



Kinerja Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Fakir Miskin)

Nessy Fauziah Sari¹, Harapan Tua Rfs²

Universitas Riau Pekanbaru

Abstract

Received: 15 Agustus 2023
Revised : 28 Agustus 2023
Accepted: 01 September 2023

Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab menangani masalah sosial yang ada di Kota Pekanbaru. Pelayanan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terdapat 26 kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dalam penelitian ini Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi objek untuk mengetahui kinerja dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja serta faktor yang mendukung dan menghambat Kinerja Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru. Teori Kinerja yang dikemukakan oleh Kumorotomo (2017) yaitu Efisiensi, Efektivitas, Keadilan dan Daya Tanggap. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan penelitian yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru cukup baik karena setiap tahunnya ada beberapa masyarakat yang sudah mampu sejahtera tanpa bantuan pemerintah, para pelaksana melaksanakan program sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sumber daya manusia ini menjadi faktor keberhasilan dinas sosial dalam menjalankan program. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan dinas sosial menjadi faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program.

Keywords: Kinerja, Dinas Sosial, Program Keluarga Harapan

(*) Corresponding Author: nessyfauziahsari@gmail.com,

How to Cite: Sari N F, & Rfs H T. (2023). Kinerja Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Fakir Miskin). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8318930>

LATAR BELAKANG

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ialah seseorang atau keluarga yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dikarenakan suatu hambatan ataupun kesulitan sehingga tidak dapat menjalin hubungan dengan lingkungannya secara serasi dan berdampak tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak dan wajar. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), fakir miskin menjadi salah satu kategori PPKS.

Fakir Miskin adalah orang tidak mempunyai mata pencarian atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupannya sendiri ataupun keluarga. Didalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial untuk masyarakat yang tidak beruntung serta melaksanakan penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah kota dan daerah beserta masyarakat.

Penanganan fakir miskin menjadi upaya yang terpadu, terarah dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beserta masyarakat berupa kebijakan, program, pendampingan dan kegiatan pemberdayaan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa fakir miskin berhak: memperoleh kecukupan kebutuhan dasarnya, memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan perlindungan sosial, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, derajat kehidupan yang layak dan kesempatan berusaha.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru menetapkan program untuk menangani permasalahan kemiskinan yaitu: Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya, Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, Peningkatan manajemen usaha bagi keluarga miskin, Pelatihan Keterampilan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin, Peningkatan layanan sosial dan Pendataan bagi keluarga miskin.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga 9 dan seseorang miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Penerima program ini tidak hanya diberikan uang tetapi juga diberikan pelatihan oleh pendamping yang ada di setiap kecamatan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didampingi agar mereka bisa sejahtera secara mandiri agar tidak ketergantungan pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tabel 1.2. Data Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2022

Kecamatan	Jan-Mar	Apr-Juni	Juli-Sep	Okt-Des
Binawidya	496	482	494	420
Bukit Raya	933	922	940	850
Kulim	592	579	591	549
Lima Puluh	581	568	588	516
Marpoyan Damai	1299	1276	1332	1220
Payung Sekaki	1010	960	990	948
Pekanbaru Kota	516	506	526	470
Rumbai	2054	1807	1869	1152
Rumbai Barat	450	662	658	1193

Rumbai Timur	580	567	591	408
Sail	186	185	188	182
Senapelan	893	883	877	134
Sukajadi	631	614	633	861
Tenayan Raya	1423	1384	1427	591
Tuah Madani	1256	1202	1227	1407
Total	12.900	12.597	12.931	10.901

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pencairan bantuan Program Keluarga Harapan disalurkan setiap tiga bulan. Pada periode pertama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdaftar 12.900, pada periode kedua terdaftar 12.597, pada periode ketiga 12.931, dan pada periode keempat 10.901. Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terus *diupdate* secara *realtime* dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga jumlah penerima setiap periodenya berbeda-beda dikarenakan cepatnya data yang diperbarui secara online.

Dalam menjalankan program, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengalami berbagai kendala. Permasalahan muncul dari masyarakat mengeluhkan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Banyak dari masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi yang serba berkecukupan tetapi tetap mendapatkan bantuan dan sarana dan prasarana yang terbatas saat melaksanakan kegiatan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Belum sejahteranya masyarakat secara sosial menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga negara belum terpenuhi secara layak dan hak sebagai warga negara belum terpenuhi secara utuh. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah sosial, Dinas Sosial harus memaksimalkan kinerjanya untuk meminimalisir jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang juga didukung oleh peran dari pemerintah serta masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari negara yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkehidupan layak. Negara tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan uraian latar belakang alasan penulis ingin mengangkat fenomena ini dengan judul **“Kinerja Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Fakir Miskin)”**

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Kinerja

Prawirosentono (dalam Sofyan, 2014:2) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, moral, dan etis, kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan berbagai tanggung jawab dan wewenangnya.

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002:15) memberikan pengertian kinerja “Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”. Kinerja ialah catatan hasil yang

diperoleh dari posisi atau aktivitas pekerjaan tertentu dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan.

Kinerja adalah implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja Wibowo (2010:4).

2. Konsep Kinerja Organisasi

Surjadi (dalam Sofyan, 2014:33) Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menandakan bahwa sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya.

Kinerja organisasi menurut Swanson (dalam Keban, 2004 : 193) Kinerja organisasi mengkaji apakah tujuan atau misi organisasi sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk aspek ekonomi, politik, dan budaya yang ada. Apakah organisasi memiliki kepemimpinan, sumber daya, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi misinya, apakah struktur, kebijakan, budaya, dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan dan apakah organisasi mengembangkan dan menjunjung tinggi kebijakan untuk mempekerjakan dan melatih sumber dayanya.

Mulyadi (2007:337) mendefinisikan kinerja organisasi sebagai keberhasilan dari tim atau organisasi maupun individu dalam mewujudkan sasaran strategis yang sebelumnya telah ditetapkan sesuai dengan perilaku yang diharapkan.

3. Pengukuran Kinerja Organisasi

Menurut Kumorotomo dalam Pasolog (2017:208) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik

1) Efisiensi

Efisiensi juga dianggap sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber sumber yang dipergunakan), atau sebagai hasil terbaik yang dihasilkan dengan sumber daya paling sedikit.

2) Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3) Keadilan

Mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

4) Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak . Karena itu , kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*), dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu Creswell (dalam Sri, 2013:3). Dalam pengumpulan informasi tentang kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru, penulis menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Organisasi Publik Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Efisiensi

Efisiensi (daya guna) anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input. Efisiensi yang tercapai dengan memanfaatkan semua faktor yang ada dengan peraturan yang tersedia yaitu anggaran, sumber daya manusia dan dukungan dari Kepala Dinas menjadi landasan dalam pelaksanaan program.

Anggaran dan Realisasi Program Keluarga Harapan Tahun 2022

Anggaran	Realisasi	Capaian
Rp. 37.500.500,000	Rp. 33.956.300,000	90,54%

Sumber Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023

Dari capaian tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada realisasi kinerja. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pencapaian anggaran pada table menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi.

Para pelaksana yang memahami tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing dan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Adanya dukungan secara finansial yang diberikan, para pendamping bisa memberikan pendampingan yang lebih maksimal dan menyelesaikan kesulitan yang terjadi selama pelatihan sehingga menghasilkan pencapaian yang lebih baik dan pencapaian kinerja dari aspek program yang telah dicapai dengan cara yang efisien dengan capaian 90,54% karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan.

2. Efektivitas

Keefektifan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkannya dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima. Tujuan utama dari program ini ialah memutuskan rantai kemiskinan dan tidak membuat keluarga miskin baru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru langsung datang ke rumah calon penerima untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan memverifikasi data calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian data yang sudah diverifikasi diberikan kepada kementerian sosial, kementerian sosial yang menentukan/

mengeluarkan data penerima yang layak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Capaian keberhasilan program sendiri terhitung sudah mensejahterahkan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Data Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan 2022

Tahun	Jumlah
2020	12.927
2021	10.901
2022	10,967

Sumber Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023

Dapat dilihat pada table diatas jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Pekanbaru dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Pekanbaru sebanyak 12.927 keluarga, kemudian pada Tahun 2020 kembali turun menjadi 10.901 keluarga dan Tahun 2022 mengalami penambahan sebesar 10,967 keluarga. Penurunan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disebabkan oleh graduasi. Graduasi dilakukan setelah penerima manfaat berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pelatihan dan pendampingan yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data.

3. Keadilan

Keadilan menjadi prinsip yang mengacu pada kesetaraan dalam perlakuan dan pembagian hak dan kewajiban di antara keadilan mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua keluarga penerima PKH. keadilan dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa semua keluarga penerima PKH memenuhi kriteria dan persyaratan yang sama, serta tidak ada diskriminasi atau penyalahgunaan dalam penerapan program ini.

Untuk pemilihan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pun ditentukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas Sosial dan pendamping PKH tidak bisa memilih siapa yang akan mendapatkan program ini. Validasi ditentukan sesuai keadaan calon penerima dan Dinas Sosial tidak ikut campur dalam pencairan karena uang langsung turun ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Satt kegiatan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dalam memanfaatkan bantuan program ini yang disesuaikan dengan komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

4. Daya Tanggap

Daya Tanggap dari Dinas Sosial diperlukan untuk menanggapi laporan-laporan yang masuk mengenai kelayakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bisa dicoret atau dikeluarkan (non eligible). Untuk mengeluarkan nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukann melalui beberapa proses, Dinas Sosial ataupun

pendamping PKH tidak bisa mengeluarkan secara sepihak. Pendamping PKH bisa melakukan pendekatan persuasive, agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat melakukan graduasi mandiri bagi yang merasa dirinya sudah tidak layak lagi menerima bantuan dan bantuan dapat dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan.

Masyarakat yang merasa dirinya layak untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi mereka tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa melapor kepada Dinas Sosial ataupun perangkat desa. Kementerian Sosial juga menyediakan layanan aspirasi dan pengaduan online untuk masyarakat melalui Lapor.go.id, halaman ini juga bisa diakses melalui website Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Faktor Penghambat Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang disiapkan belum mampu menunjang kegiatan pendampingan dengan maksimal. Modul yang diberikan hanya berbentuk pdf, sedangkan untuk mencetak modul membutuhkan biaya lagi. 67 Dengan adanya infocus akan lebih meminimalisir pengeluaran dan memudahkan kegiatan sebagai penunjang kinerja

2. Pencairan atau penyaluran

Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak mengetahui pasti kapan tepatnya pencairan dilakukan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru merasa kurangnya koordinasi dari Kementerian Sosial kepada Dinas Sosial terhadap masalah pencairan sedangkan para penerima sering bertanya kapan waktu pencairan dilakukan.

Faktor Pendukung Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Sinergi dari semua sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan dari program ini. Pelaksana yang paham dengan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan Kementerian Sosial.

KESIMPULAN

Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Fakir Miskin) cukup baik. Pelayanan yang dilaksanakan sudah efisien, efektif dan adil. Tetapi untuk daya tanggap masih kurang dikarenakan fasilitasi untuk pengaduan online baru disediakan oleh Kementerian Sosial tidak dari Dinas Sosial langsung. Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga tidak bisa langsung mencabut penerima bantuan yang tidak layak, harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Faktor yang menjadi penghambat kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kurangnya koordinasi Dinas Sosial dengan kementerian sosial untuk masalah pencairan, dan masalah penyaluran penerima yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) lagi dan Dinas Sosial tidak bisa mengusulkan bantuannya kembali kepada kementerian sosial. Faktor

yang menjadi pendukung kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah Sinergi dari para pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH).

DAFTAR REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2012) (Jilid Dua). Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Keban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Hadi, W. M., & Chalid Sahuri. (2013). Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. UR-Student Paper Diploma
- Hadi, W. M., & Chalid Sahuri. (2013). Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. UR-Student Paper Diploma
- Mulyadi. (2007). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasucha, C. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Grafindo.
- Pasolong, H. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ruky, A. S. (2004). Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tsauri, S. (2014). Manajemen Kinerja Performance Management. Jember: STAIN Jember Press.
- Wahyuningsih, S. (2013) Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan. Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya). Madura: UTM Press

Dokumen

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin